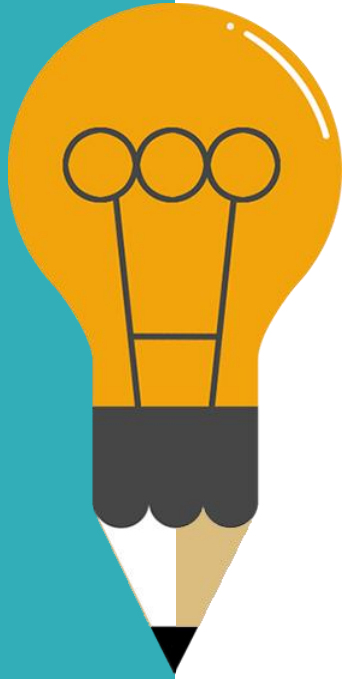


# TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2017

Jakarta  
Senin, 19 Februari 2017

# Struktur Penyajian



01

Latar Belakang

02

Tujuan

03

Metodologi

04

Sumber Data dan Waktu  
Pemantauan

05

Temuan



# PENDAHULUAN

# Latar Belakang



Informasi penanganan perkara korupsi yang diproses oleh aparat penegak hukum cenderung belum transparan. Pun jika ada data yang tersedia hanya berupa statistik akumulatif per tahun.





# Tujuan

01

Pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh institusi penegak hukum pada tahun 2017.

02

Mendorong transparansi data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK).

# Metodologi

01

Melakukan pemantauan kasus korupsi di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka.

02

Pengumpulan data kasus korupsi yang telah dipublikasi oleh penegak hukum, baik melalui situs resmi atau melalui media massa.

03

Melakukan tabulasi atas kasus-kasus yang terungkap ke publik dan terpantau oleh ICW.

04

Membandingkan statistik pada semua parameter analisis.

05

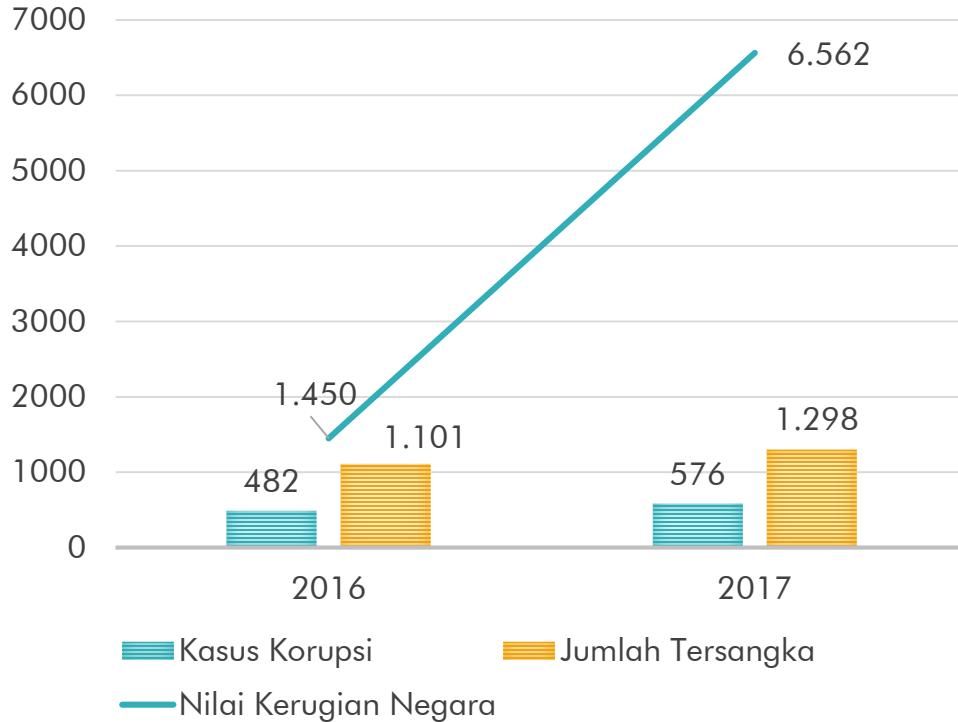
Melakukan analisis deskriptif atas penyidikan kasus korupsi.

# Kinerja Penindakan Perkara Korupsi Tahun 2017



# Perbandingan Penyidikan Kasus Korupsi

Tahun 2016 dan Tahun 2017



A

Adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi dari tahun 2016 ke tahun 2017.

B

Aktor yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum meningkat karena adanya penetapan tersangka baru di tahun 2017 seperti kasus KTP elektronik (KTP-el)

C

Nilai kerugian negara yang timbul meningkat signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Salah satu kasus yang nilai kerugian negaranya sangat besar adalah kasus dugaan korupsi pemberian kredit kapal oleh PT PANN dengan menimbulkan kerugian negara Rp 1,4 triliun





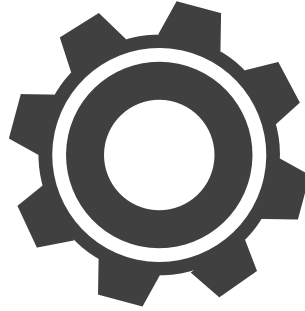
Pada tahun 2017 ICW mencatat dari 576 kasus korupsi yang berhasil disidik, 26 kasus diantaranya adalah pengembangan kasus yakni adanya tersangka baru yang ditetapkan oleh penegak hukum. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi KTP-el yang melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto.



# 10 Pengembangan Kasus Terbesar Tahun 2017

1. Kasus dugaan suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Yudi Widiana (Anggota DPR fraksi PKS) dan Musa Zainuddin (Anggota DPR fraksi PKB).
2. Kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Andi Narogong (pihak swasta), Markus Nari (anggota DPR fraksi Golkar), Setya Novanto (ketua DPR fraksi Golkar), Anang Sugiana Sudiharja (swasta).
3. Kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Fahd A Rafiq (Ketua DPP Partai Golkar bidang Pemuda dan Olahraga).
4. Kasus dugaan suap pengadaan alat pemantau satelit di Bakamla dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Nofel Hasan (Ketua Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla).
5. Kasus dugaan suap jual beli jabatan di Klaten dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Bambang Teguh Setya (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dina Pendidikan Kabupaten Klaten) dan Sudirno (Sekretaris Dinas Pendidikan).
6. Kasus dugaan korupsi pengadaan alat UPS di Jakarta dengan menetapkan tersangka baru yaitu, korporasi PT Offistarindo Adhiprima.
7. Kasus dugaan korupsi PDAU Sidoarjo dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Khoirul Huda (Anggota DPRD fraksi Golkar), Amral Soegianto (Direktur PDAU), Siti Winarni dan Umam Junaedy (swasta).
8. Kasus dugaan korupsi sejumlah kegiatan fiktif di Kementerian ESDM dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Sri Utami (Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara).
9. Kasus dugaan korupsi rapat fiktif di Kementerian Agama dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Iyan Sofyan (Kasubag Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran).
10. Kasus dugaan korupsi pemberian kredit Bank Pembangunan Daerah Papua tahun 2008-2013 dengan menetapkan tersangka baru yaitu, Achmad Darmadi, Andang Ajiyoso, Parwoto Kristianto, Kondo dan Haedar (Kepala cabang BPD Papua di Kalimana Periode 2008-2013).

# Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Modus



## Penyalahgunaan Anggaran

Kasus Korupsi : 154 kasus  
Nilai Kerugian Negara : Rp 1,2 triliun

01

## Mark Up

Kasus Korupsi : 77 kasus  
Nilai Kerugian Negara : Rp 1,8 triliun

02

## Pungutan Liar

Kasus Korupsi : 71 kasus  
Nilai Kerugian Negara : Rp -

03

## Penyalahgunaan Wewenang

Kasus Korupsi : 61 kasus  
Nilai Kerugian Negara : Rp 2,3 triliun

04

## Laporan Fiktif

Kasus Korupsi : 56 kasus  
Nilai Kerugian Negara : Rp 616 triliun

05

## Kegiatan/Proyek Fiktif

Kasus Korupsi : 54 kasus  
Nilai Kerugian Negara : Rp 227 miliar

06

Modus korupsi yang sering dilakukan oleh pelaku korupsi dan ditangani oleh penegak hukum adalah penyalahgunaan anggaran. Namun nilai kerugian negara paling besar terjadi pada modus penyalahgunaan wewenang. Salah satu kasusnya adalah pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta penyalahgunaan menyangkut ekspor nikel oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 630 miliar dan ditangani oleh Kejaksaan Agung.

07

## Penggelapan

Kasus Korupsi : 44 kasus  
Nilai Kerugian Negara : Rp 187 miliar

08

## Suap

Kasus Korupsi : 42 kasus  
Nilai Suap : Rp 211 miliar

09

## Penyunatan/Pemotongan

Kasus Korupsi : 10 kasus  
Nilai Kerugian Negara : Rp 3,9 miliar

10

## Pemerasan

Kasus Korupsi : 3 kasus  
Nilai Pemerasan : Rp 189 juta

11

## Mark Down

Kasus Korupsi : 2 kasus  
Nilai Kerugian Negara : Rp 41,7 miliar

# Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Sektor (5 Terbanyak)



01

## Anggaran Desa

Jumlah Kasus : 98 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 39,3 miliar

02

## Pemerintahan

Jumlah Kasus : 55 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 255 miliar

03

## Pendidikan

Jumlah Kasus : 53 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 81,8 miliar

04

## Transportasi

Jumlah Kasus : 52 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 985 miliar

05

## Sosial Kemasyarakatan

Jumlah Kasus : 40 kasus

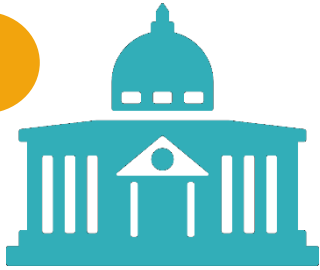
Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 41,1 miliar



Sektor pengelolaan anggaran desa pada tahun 2017 sangat rawan dikorupsi. Ada sebanyak 98 kasus korupsi yang terkait dengan anggaran desa. Selain itu sektor pemerintahan menjadi peluang cukup besar untuk dikorupsi. Hal yang sama terjadi pada sektor pendidikan, transportasi dan sosial kemasyarakatan.

# Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Lembaga (5 Terbanyak)

01



## Pemerintah Kabupaten

Jumlah Kasus : 222 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 1,17 triliun

Jumlah Tersangka : 326 tersangka

02



## Pemerintah Desa

Jumlah Kasus : 106 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 33,6 miliar

Jumlah Tersangka : 154 tersangka

03



## Pemerintah Kota

Jumlah Kasus : 45 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 159 miliar

Jumlah Tersangka : 52 tersangka

04



## BUMN

Jumlah Kasus : 23 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 2,8 triliun

Jumlah Tersangka : 51 tersangka

05



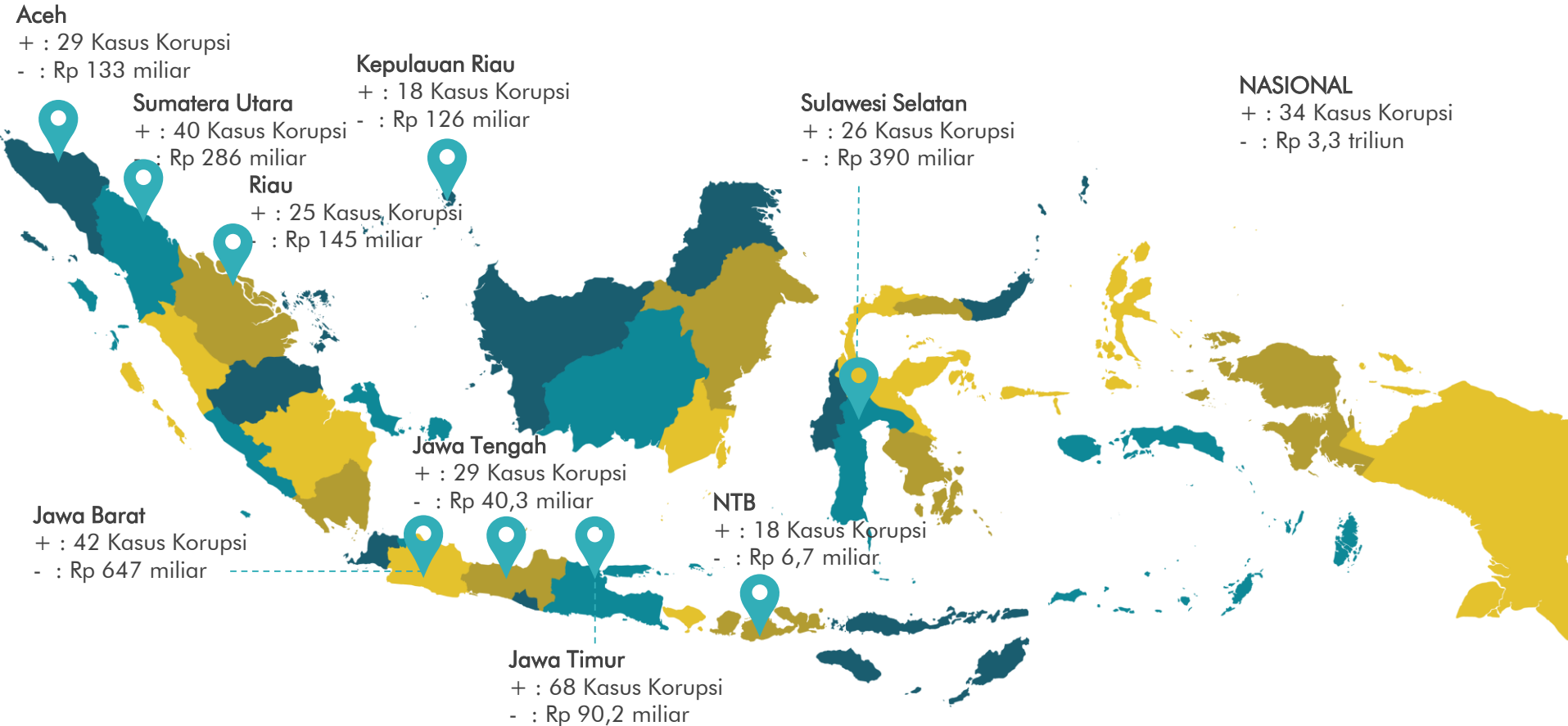
## Kementerian

Jumlah Kasus : 19 kasus

Jumlah Nilai Kerugian Negara : Rp 710 miliar

Jumlah Tersangka : 19 tersangka

# Kasus Korupsi Tahun 2017 Berdasarkan Provinsi (10 Terbanyak)







“ Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi dengan nilai kerugian negara paling besar yaitu, Rp 647 miliar. Kasus korupsi dengan nilai kerugian negara paling besar di Jawa Barat adalah kasus dugaan korupsi pencairan kredit fiktif di Bank Jabar (BJB) Syariah yang melibatkan Yocie Gusman selaku Plt Dirut BJB Syariah dengan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 628 miliar dan diproses oleh Bareskrim Polri. ”



Penandatanganan  
Memorandum of Understanding (MoU)  
**MEWUJUDKAN E-PROCUREMENT  
YANG BERINTEGRITAS**  
Jakarta, Senin 13 April 2015

## Kasus Korupsi Tahun 2017

### Berdasarkan Pengadaan dan Non Pengadaan

Dari 495 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, 119 orang atau sekitar 24 persen menjabat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa, baik itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).



#### Non Pengadaan

Jumlah Kasus : 335 kasus  
Jumlah Nilai Kerugian  
Negara : Rp 5 triliun



#### Pengadaan

Jumlah Kasus : 241 kasus  
Jumlah Nilai Kerugian  
Negara : Rp 1,5 triliun

Sumber: <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/3361>

# Jumlah Aktor yang Ditetapkan Sebagai Tersangka (10 Terbanyak)



Aparatur Sipil  
Negara (ASN)  
495 tersangka



Swasta  
241 tersangka



Kepala Desa  
102 tersangka



Masyarakat  
59 tersangka



Dirut atau karyawan  
BUMN  
50 tersangka



Ketua/Anggota  
Organisasi/Kelompok  
44 tersangka



Aparatus Desa  
38 tersangka



Ketua/Anggota  
DPRD  
37 tersangka



Kepala Daerah  
30 tersangka



Dirut atau karyawan  
BUMD  
30 tersangka



Aktor yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi berasal dari ASN. Selain itu, ICW mencatat setidaknya ada 4 korporasi yang dijerat oleh penegak hukum pada tahun 2017. Salah satunya adalah PT Offistradinod Adhiprima terkait kasus dugaan pengadaan UPS di Pemda Jakarta.





Gubernur/Wakil  
Gubernur  
1 tersangka



Walikota/Wakil  
Walikota  
5 tersangka



Bupati/Wakil  
Bupati  
24 tersangka

Ada sebanyak 30 orang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama tahun 2017 di 29 daerah. Dari 29 daerah 12 diantaranya akan menyelenggarakan Pilkada tahun 2018. Dari 12 daerah 5 kepala daerah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 1 kepala daerah diputus bebas oleh hakim karena tidak terbukti menerima gratifikasi. Modus yang paling banyak adalah suap menyuap dengan 11 kasus korupsi. Selain itu ada modus penyalahgunaan wewenang sekitar 9 kasus korupsi.

No	Objek Korupsi	Jumlah Kasus
1	Penyalahgunaan APBD	9
2	Perizinan	6
3	Infrastruktur	3
4	Pengadaan Barang dan Jasa	3
5	Rekrutmen CPNS, Promosi dan Mutasi Pejabat Daerah	2
6	Dana Desa	1
7	Dana Hibah	1
8	Pencucian Uang	1
9	Pengadaan Tanah	1
10	Tunjangan DPRD	1
11	Penjualan Aset Daerah	1
Total		29

Penegak hukum yang menangani korupsi kepala daerah yaitu KPK sebanyak 11 kasus, Kejaksaan sebanyak 10 kasus dan Kepolisian sebanyak 8 kasus.

## Objek Korupsi Kepala Daerah

# 12 Daerah Yang Akan Menyelenggarakan Pilkada 2018

No	Nama Daerah	No	Nama Daerah
1.	Kab. Bangka	7.	Kota Tegal
2.	Kab. Lombok Timur	8.	Kab. Nganjuk
3.	Kab. Kupang	9.	Kota Mojokerto
4.	Kab. Biak Numfor	10.	Kota Madiun
5.	Kab. Dogiyai	11.	Kab. Pamekasan
6.	Kab. Batu Bara	12.	Kota Batu

## 6 Kepala Daerah Yang Pernah Terjerat Kasus Korupsi Dan Berencana Mengikuti Pilkada

No	Nama Daerah	Tersangka Korupsi	Keterangan
1	Kota Tegal	Wali Kota Siti Masitha Soeparno	Berencana mengikuti Pilkada Kota Tegal.
2	Kab. Nganjuk	Bupati Taufiqurrahman	Ita Triwibawa, istri Taufiqurrahman berencana mengikuti Pilkada Kabupaten Nganjuk.
3	Kota Mojokerto	Wali Kota Masud Yunus	Berencana mengikuti Pilkada Kota Mojokerto
4	Kab. Kutai Kartanegara	Bupati Rita Widyasari	Berencana mengikuti Pilkada Provinsi Kalimantan Timur
5	Kota Batu	Wali Kota Eddy Rumpoko	Tertangkap saat istrinya, Dewi Rumpoko menjadi calon Wali Kota Batu.
6	Kab. Lombok Timur	Bupati Sukiman Azmy	Bakal calon Bupati Lombok Timur 2018. Ia pernah diduga menerima gratifikasi namun hakim membebaskan karena tidak terbukti.

**Kepolisian**  
Jumlah Kasus Korupsi  
216 kasus korupsi  
Jumlah Tersangka  
436 tersangka  
Kerugian Negara  
Rp 1,6 triliun  
Nilai Suap  
Rp 975 juta



**Kejaksaan**  
Jumlah Kasus Korupsi  
315 kasus korupsi  
Jumlah Tersangka  
730 tersangka  
Kerugian Negara  
Rp 4,4 triliun  
Nilai Suap  
Rp 21,8 miliar



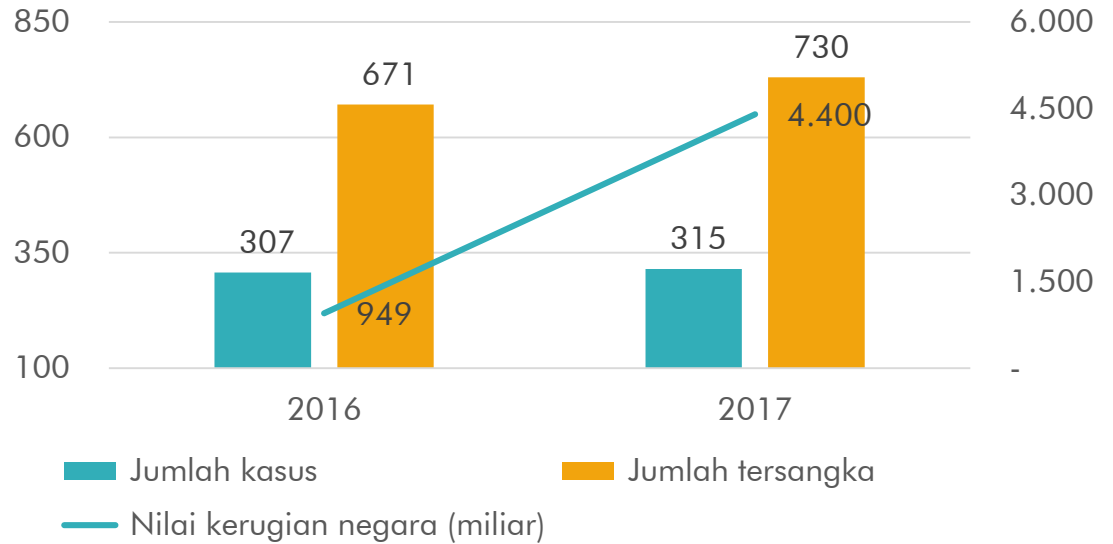
**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi




**KPK**  
Jumlah Kasus Korupsi : 44 kasus korupsi  
Jumlah Tersangka : 128 tersangka  
Kerugian Negara : Rp 209,7 miliar  
Nilai Suap : Rp 188,3 miliar

**Kinerja  
Penyidikan  
Aparat  
Penegak  
Hukum  
Tahun 2017**



# Kinerja Penyidikan Kasus Korupsi di Kejaksaan Tahun 2017



 Mantan Menteri 1 tersangka	 Ketua/Anggota DPRD 9 tersangka	 Bupati/ Wakil Bupati 11 tersangka
---	---	--

Jampidsus

1 Kantor

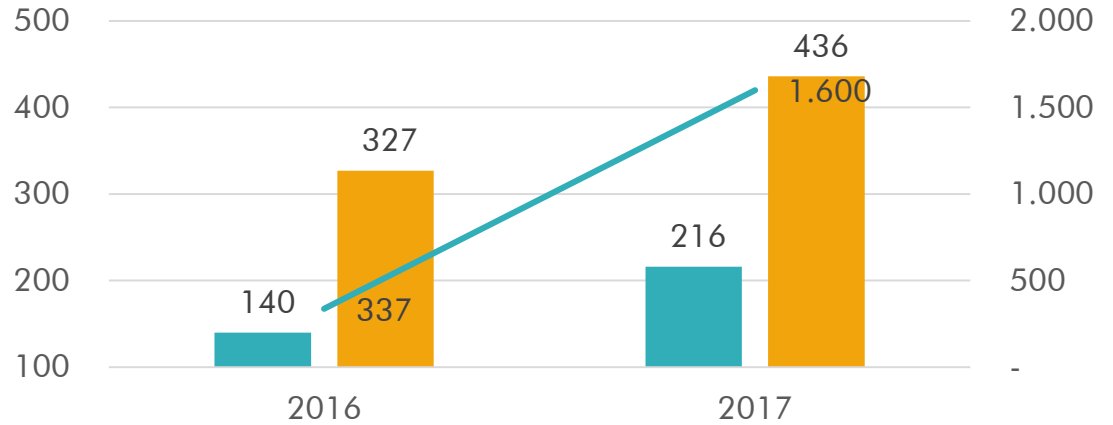
Kejaksaan  
Tinggi

32 Kantor


Kejaksaan  
Negeri

488 Kantor

# Kinerja Penyidikan Kasus Korupsi di Kepolisian Tahun 2017



■ Jumlah kasus  
■ Jumlah tersangka  
— Nilai kerugian negara (miliar)



Bupati/  
Wakil Bupati  
8 tersangka



Ketua/Anggota  
DPRD  
10 tersangka



Dirut/Karyawan  
BUMN  
14 tersangka

**Bareskrim**

1 Kantor

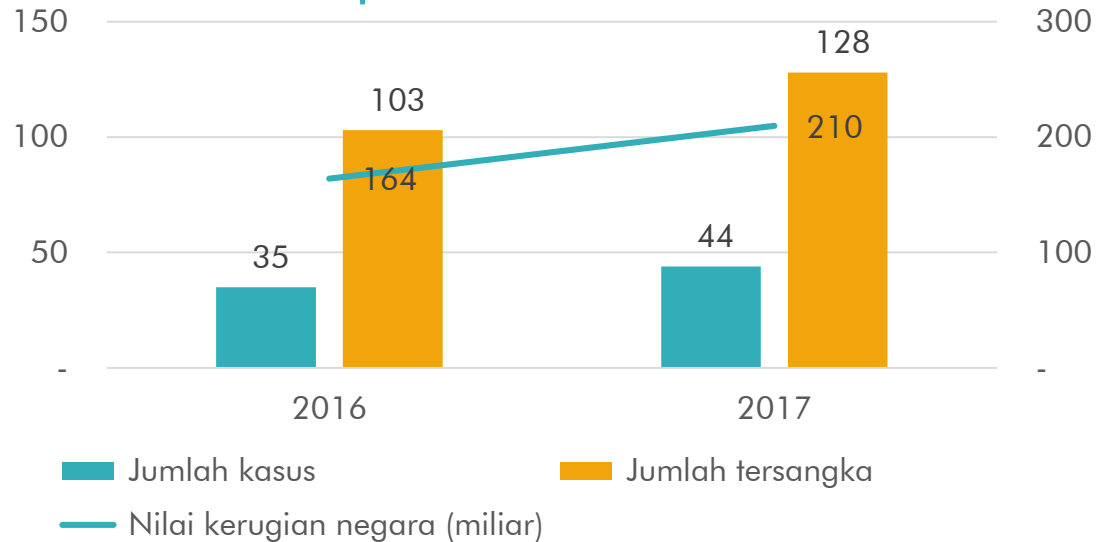
**Kepolisian  
Daerah**

33 Kantor

**Kepolisian  
Resor**

502 Kantor

# Kinerja Penyidikan Kasus Korupsi di KPK Tahun 2017



Berdasarkan pemantauan yang telah ICW lakukan sepanjang tahun 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 18 kasus. Pada tahun 2016 OTT yang dilakukan KPK sebanyak 17 kasus. Hal ini merupakan pencapaian dari segi kuantitas.

Secara kualitas, tahun 2017 KPK menangkap tangkap Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Selain itu KPK juga berhasil menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP-el. Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi antara lain Wali Kota sebanyak 5 orang, Bupati sebanyak 5 orang dan Gubernur sebanyak 1 orang

01

Penindakan kasus korupsi meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017 baik dari jumlah kasus yang disidik, jumlah pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka hingga nilai kerugian negara yang berhasil diperoleh oleh penegak hukum.

02

Sepanjang tahun 2017 KPK berhasil melakukan OTT sebanyak 18 kasus. Salah satunya yang melibatkan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.

03

Pengadaan barang dan jasa masih menjadi persoalan dimana ada sekitar 42 persen atau sebanyak 241 kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan. Selain itu, pejabat pengadaan yang tertangkap akibat korupsi sekitar 119 orang atau sekitar 24 persen dari total tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum.

04

Ada sebanyak 30 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di 29 daerah di Indonesia. Dari 30 kepala daerah 5 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berencana mencalonkan diri atau keluarganya sebagai kepala daerah.

05

Objek yang dikorupsi oleh kepala daerah paling banyak terkait dengan pengelolaan APBD sebanyak sembilan kasus korupsi. Kemudian terkait dengan perizinan sebanyak enam kasus korupsi.

06

Pengelolaan anggaran desa menjadi sektor yang banyak dikorupsi karena besarnya anggaran yang digelontorkan ke desa namun minimnya kapasitas aparatus desa dalam mengelola keuangan.

## KESIMPULAN

## REKOMENDASI

Perlu adanya koordinasi dan supervisi antar penegak hukum agar kasus-kasus korupsi lainnya dapat diproses terutama kasus korupsi yang masih belum ditangani sejak lama.

01

KPK perlu menangani kasus korupsi yang mulainya dari “*case building*” agar seluruh kasus korupsi yang ditangani dapat menyentuh hingga aktor inti.

02

Perlu adanya pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) pada saat proses pengadaan agar tidak ada potensi atau celah terjadinya tindak pidana korupsi. Serta optimalisasi penggunaan katalog elektronik untuk pembelian barang dan penggunaan kontrak elektronik agar lebih transparan.

03

Perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam membina kepala daerah agar tidak ada lagi yang terjerat kasus korupsi. KPK pun perlu melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan terhadap daerah yang kepala daerahnya pernah terjerat kasus korupsi.

04

Perlu adanya transparansi dari kepala daerah untuk membuka anggaran serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi anggaran daerah. Dalam hal dana kampanye, calon kepala daerah perlu untuk meminimalisir biaya kampanye agar tidak ada lagi potensi penggelapan yang dilakukan ketika terpilih.

05

Pengelolaan anggaran desa menjadi sektor yang banyak dikorupsi karena besarnya anggaran yang digelontorkan ke desa namun minimnya kapasitas aparatus desa dalam mengelola keuangan.

06



Terima kasih



2018